**JISHARA**
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aryasatya
Vol. 2. No. 1 (2025) pp. 12-17

**E-ISSN : XXXX-XXXX**
**P-ISSN : XXXX-XXXX**

# Laporan Keuangan Menjadi Alat Politik: Studi Naratif APBD

**Daniel Tonu**
Universitas Aryasatya Deo Muri
danni.tonu84@gmail.com

## Abstrak

Laporan keuangan pemerintah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Namun, dalam praktiknya, laporan keuangan tersebut sering dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk memperkuat posisi kekuasaan atau melemahkan pihak lawan. Penelitian ini bertujuan mengungkap berbagai narasi politik yang tersembunyi dalam proses penyusunan, penyajian, dan pemanfaatan laporan APBD. Melalui pendekatan kualitatif naratif dan studi kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil pengujian, ditemukan bahwa APBD kerap digunakan sebagai alat untuk legitimasi politik, distribusi patronase, serta kampanye terselubung. Temuan ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak bersifat netral, melainkan terkait erat dengan dinamika hubungan kekuasaan yang kompleks. Penelitian ini merekomendasikan agar perlunya peningkatan tata kelola keuangan yang berintegritas, pengawasan yang independen, dan peningkatan literasi fiskal masyarakat.

**Kata Kunci**
APBD, Kebijakan Anggaran, Narasi Keuangan, Laporan Keuangan

## *Abstract*

*Government financial report, particularly the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), is essentially a tool for public accountability and transparency. However, the financial report, in practice, is able to be a political instrument used to strengthen the power or weaken the political opponents. This study aims at uncovering hidden political narratives in arranging, presenting, and the use of APBD report. This study was conducted in the East Nusa Tenggara Provincial Government for the 2019-2024 periods applying a qualitative narrative approach. The study found that the APBD is often used as a tool for political legitimacy, distribution of patronage, and as a covert campaign tool. The findings indicate that the financial report is biased but it is embedded in a complex context of power relations. This study recommends the need to strengthen integrity-based financial governance, independent oversight, and public fiscal literacy.*

***Keywords***
*APBD, Budget Policy, Financial Narrative, Financial Report, Power.*

## Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan prioritas pembangunan di tingkat daerah. Namun, selain peran teknisnya, APBD juga merupakan hasil dari dinamika politik. Dalam banyak kasus, proses penyusunan, pembahasan, dan pemanfaatan APBD sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik para aktor baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Isu penggunaan laporan keuangan sebagai alat politik sudah lama menjadi fokus perhatian dalam kajian akuntansi kritis. Laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi fiskal, tetapi juga berfungsi menyampaikan pesan politik, membentuk citra, serta menegakkan legitimasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana laporan APBD berperan sebagai alat strategi kekuasaan di tingkat lokal.

**E-ISSN : XXXX-XXXX**
**P-ISSN : XXXX-XXXX**

Laporan keuangan pemerintah, termasuk APBD, pada dasarnya adalah alat untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Namun pada praktiknya, laporan keuangan terkadang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik, terutama pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, dalam pembahasan anggaran oleh DPRD, atau sebagai upaya mempertahankan posisi elite politik lokal.

Di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), proses penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali dipengaruhi oleh dinamika kepentingan politik. Penentuan alokasi anggaran, pengaturan belanja modal dan barang, serta penetapan program prioritas sering mencerminkan hasil kompromi dan negosiasi antara eksekutif dan legislatif yang sarat unsur politik. Kondisi ini berpotensi menggeser APBD dari prinsip keadilan fiskal dan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat luas. NTT, dengan karakteristik wilayah kepulauan, indeks pembangunan manusia yang masih rendah, dan ketergantungan besar pada dana transfer pusat, menjadi wilayah yang menarik untuk dianalisis. Di sana, anggaran kerap berperan sebagai simbol bagi para pengambil keputusan untuk menunjukkan dukungan pada kelompok tertentu, mempertahankan koalisi politik, atau memperkuat citra keberhasilan pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, laporan keuangan tidak lagi bersifat netral secara teknis, melainkan dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini publik, merancang narasi kesuksesan politik, atau menyamarkan ketidakadilan kebijakan. Studi naratif terhadap dokumen dan praktik penyusunan APBD di NTT dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana angka-angka dalam laporan keuangan berubah fungsi menjadi alat politik dalam praktiknya.

Di Nusa Tenggara Timur, penelitian mengenai laporan keuangan daerah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sering kali hanya bersifat formalitas. Studi oleh Harun et al. (2012) dan Mardiasmo (2009) menunjukkan bahwa pengaruh elit politik lokal sangat dominan dalam membentuk narasi anggaran. Di NTT, tantangan seperti ketimpangan wilayah, lemahnya pengawasan masyarakat, dan budaya patrimonialisme membuat laporan keuangan rawan digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.

## Tinjauan Pustaka

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan APBD yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai wakil publik (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Laporan tersebut memuat data keuangan terkait realisasi anggaran, neraca, kegiatan operasional, serta perubahan ekuitas yang berfungsi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas. Namun pada prakteknya, proses penyusunan dan penyajian laporan tersebut tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di legislatif dan eksekutif. APBD sendiri merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang menggambarkan prioritas pembangunan. Meski demikian, kajian kritis mengungkap bahwa APBD kerap menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik, terutama pada masa menjelang pemilu atau saat terjadi pergantian kepemimpinan daerah (Prabowo & Sutopo, 2018).

Dalam perspektif Politik Anggaran dan Akuntansi sebagai Sarana Kekuasaan, akuntansi dianggap sebagai praktik sosial dan politis yang telah dibahas dalam karya para ahli seperti Tinker (1980), Hopper & Powell (1985), dan Laughlin (1995), yang menegaskan bahwa akuntansi tidak netral melainkan bisa digunakan untuk membentuk realitas, membenarkan tindakan, bahkan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks APBD, laporan keuangan sering kali dimanipulasi secara naratif agar sesuai dengan visi politik kepala daerah atau kepentingan legislatif. Studi mengenai Narasi dalam Akuntansi menunjukkan bahwa informasi keuangan bukan sekadar angka, tapi sebuah cerita yang membangun persepsi publik dan legitimasi. Model narasi yang digagas oleh Czarniawska (2004) dan Oakes et al. (1994) memandang narasi sebagai alat memahami strategi kekuasaan di balik pelaporan keuangan.

Sebagai contoh, narasi APBD di NTT sering dibalut dengan istilah pembangunan, namun kenyataannya menunjukkan kecenderungan patronase atau pendanaan proyek-proyek elit. Dalam konteks tersebut, laporan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk menampilkan kinerja semu (misalnya anggaran terserap 100% tetapi dampak riilnya minim), mempertahankan atau memperluas pengaruh politik, serta membangun citra keberhasilan yang tidak selalu selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

**E-ISSN : XXXX-XXXX**
**P-ISSN : XXXX-XXXX**

**Transparansi dan Akuntabilitas yang Bersifat Simbolik**

Secara teori, upaya reformasi dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia, termasuk penerapan akuntansi berbasis akrual, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta kewajiban publikasi APBD, dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas. Namun, dalam kenyataannya, terutama di wilayah 3T seperti NTT, transparansi tersebut seringkali hanya bersifat formalitas administratif semata. Anggaran memang dipublikasikan, tetapi tidak mudah diakses atau dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga menciptakan kesan transparansi yang palsu. Hal ini didukung oleh temuan Harun et al. (2012), yang menyatakan bahwa proses penyusunan dan pemanfaatan anggaran daerah dikuasai oleh elite lokal. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk membangun narasi bahwa mereka "berhasil" atau "peduli kepada rakyat", meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Di NTT, elite politik memiliki kendali kuat atas birokrasi dan distribusi anggaran, terutama untuk proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan popularitas mereka secara politik.

Ketimpangan antarwilayah dan lemahnya pengawasan juga menjadi persoalan. NTT mengalami disparitas wilayah yang cukup besar dan keterbatasan infrastruktur pengawasan. Banyak daerah terpencil sulit dijangkau oleh lembaga pengawas, baik yang internal seperti Inspektorat Daerah maupun eksternal seperti BPK dan DPRD. Kondisi ini memperbesar risiko penyimpangan keuangan karena minimnya kontrol yang efektif. Di Nusa Tenggara Timur, budaya patrimonialisme dan hubungan patron-klien menjadi penghalang, di mana hubungan antara pemimpin dan masyarakat didasarkan pada patronase. Akibatnya, anggaran sering kali diarahkan untuk memperkuat dukungan politik daripada untuk kebutuhan pembangunan yang objektif. Laporan keuangan pun berpotensi dimanipulasi untuk mendukung narasi keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

Kajian yang dilakukan oleh Harun, H., & Kamase, H. (2012) mengenai Politik Anggaran di Pemerintahan Daerah Indonesia menyoroti bagaimana kepala daerah dan legislatif memanfaatkan APBD untuk kepentingan politik, terutama menjelang pemilihan umum, sehingga banyak program populis dimasukkan sebagai strategi politik. Sejalan dengan temuan Kaho, J. (2014) tentang kaitan antara Politik Anggaran dan Kesejahteraan di daerah tertinggal seperti wilayah 3T dan NTT, terlihat adanya hubungan antara alokasi APBD dengan kepentingan politik lokal. Selanjutnya, penelitian Nababan, M. R., & Eko, S. (2018) di Flores Timur dan Sumba Timur menunjukkan bahwa APBD digunakan sebagai alat politisasi dalam Pilkada dengan memanfaatkan program-program yang ada untuk menggalang dukungan elektoral. Demikian pula, Yani, A. (2020) yang mengkaji narasi politik APBD secara kualitatif menemukan bahwa narasi yang dominan dalam penentuan prioritas anggaran adalah milik elite politik.

**Teori Legitimasi, Institusional dan Naratif**

Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi, termasuk pemerintah daerah, berusaha memperoleh dan mempertahankan legitimasi di mata masyarakat melalui penyampaian informasi yang sesuai dengan ekspektasi publik. Dalam hal penyusunan laporan keuangan, seperti APBD dan LKPD, dokumen ini dapat digunakan untuk menampilkan legitimasi, meskipun pelaksanaannya tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan (Suchman, 1995). Teori ini berhubungan erat dengan teori institusional yang menekankan bahwa praktik organisasi, termasuk pelaporan keuangan, dibentuk oleh norma, budaya, dan tekanan dari institusi. Dalam konteks APBD, pelaporan dipengaruhi tidak hanya oleh standar teknis, tetapi juga oleh faktor politik, norma sosial, dan kekuasaan (DiMaggio & Powell, 1983). Selain itu, Teori Naratif melihat laporan keuangan sebagai sebuah narasi yang mempunyai alur, tokoh, dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, laporan APBD dianggap sebagai cerita yang dikendalikan oleh aktor politik untuk membentuk opini masyarakat dan menciptakan gambaran efisiensi dan keberhasilan. Berbeda dengan teori Critical Accounting Theory yang dikembangkan oleh Tinker (1980) dan Hopper & Powell (1985), teori ini memandang akuntansi sebagai alat ideologi dalam struktur sosial. Pelaporan keuangan tidak hanya aspek teknis tetapi juga politis, di mana pengendali laporan memiliki kekuasaan atas makna, kekuasaan, dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat tanpa syarat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi naratif. Fokus utamanya adalah menginterpretasi makna sosial-politik di balik laporan APBD. Teknik pengumpulan data ialah Dokumentasi (APBD 2019–2024), Wawancara mendalam dan juga dilakukan Observasi partisipatif (rapat paripurna anggaran) dan menganalisis menggunakan analisis naratif Polkinghorne (1995): identifikasi plot, aktor, tujuan, konflik, dan resolusi dalam narasi anggaran. Polkinghorne menekankan bahwa cerita adalah cara utama manusia memberi

**E-ISSN : XXXX-XXXX**
**P-ISSN : XXXX-XXXX**

makna pada pengalaman. Analisis naratif dapat digunakan baik untuk membentuk narasi dari data (*narrative analysis*), maupun untuk menganalisis kumpulan cerita (*analysis of narratives*).

## Temuan

Laporan keuangan, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis, tetapi juga mengandung muatan politik. Dalam proses penyusunannya, mulai dari perancangan, pembahasan hingga pengesahan, terdapat banyak negosiasi dan lobi politik bahkan pertukaran kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Narasi utama dalam APBD biasanya menonjolkan upaya pemerintah daerah dalam menangani isu-isu tertentu seperti kemiskinan dan pendidikan, namun kenyataannya sejumlah program unggulan sering kali hanya berfungsi sebagai alat pencitraan dan tidak dilaksanakan dengan optimal. Di sisi lain, laporan keuangan juga digunakan untuk membingkai narasi keberhasilan pemerintah, terutama di masa menjelang tahun politik atau pemilihan kepala daerah. Penonjolan indikator tertentu seperti pencapaian pendapatan tinggi atau surplus anggaran dimanfaatkan untuk menyembunyikan kegagalan melalui bahasa teknis atau istilah akuntansi yang sulit dipahami masyarakat umum, serta strategi pelaporan positif yang menutupi inefisiensi dan maladministrasi.

**Relasi Kuasa dalam Proses APBD**

Dalam wawancara mendalam dengan sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditemukan bahwa proses penyusunan anggaran APBD sering kali dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kekuasaan. Eksekutif memiliki posisi dominan dalam mengontrol narasi, sementara legislatif hanya terlibat pada bagian-bagian tertentu yang memberikan keuntungan politik atau ekonomi. Eksekutif menguasai narasi utama dan informasi karena memiliki akses eksklusif terhadap data, perencanaan teknokratik, dan tim anggaran profesional. Dokumen awal seperti RKPD dan KUA-PPAS disiapkan terlebih dahulu oleh eksekutif dengan narasi yang sudah terbentuk sehingga sulit untuk diubah. Seringkali legislatif menerima narasi ini tanpa cukup kesempatan untuk mengajukan alternatif yang substantif.

Legislatif, terutama DPRD, lebih berperan sebagai aktor politik yang hanya ikut campur dalam aspek-aspek tertentu, seperti pengalokasian dana aspirasi, pokok pikiran, atau proyek yang bisa digunakan untuk pencitraan politik. Intervensi legislatif jarang masuk ke kebijakan makro atau prioritas strategis daerah, yang menandakan mereka bukan pengimbang yang penuh, melainkan perantara kepentingan pragmatis.

Ketidakseimbangan ini juga karena asimetri pengetahuan dan kewenangan, di mana eksekutif menguasai aspek teknis anggaran, sedangkan banyak legislator hanya memahami proses secara permukaan. Legislatif sangat bergantung pada penjelasan dari eksekutif, memperkuat posisi dominan eksekutif dalam diskusi anggaran. Akhirnya, eksekutif menggunakan bahasa teknokratis dan logika pembangunan untuk melegitimasi pilihan anggaran mereka, sementara legislatif lebih mengandalkan alasan representatif dan tuntutan konstituen. Namun, pada praktiknya, narasi dominan tetap berasal dari eksekutif, karena bahasa teknokratis sering dianggap lebih rasional dan sesuai prosedur. Berikut adalah tabel ringkasan temuan tematik dari studi naratif ini sebagai berikut:

Tabel 1 .
Temuan Tematik dari Studi Naratif

| Isu | Narasi Politik yang Muncul | Dari APBD NTT |
|---|---|---|
| *Politik Anggaran* | APBD diarahkan untuk menyenangkan kelompok pendukung | Alokasi proyek padat karya di daerah pemilih tertentu |
| *Framing Keberhasilan* | Pelaporan realisasi anggaran disusun sedemikian rupa agar tampak positif | Laporan realisasi 95%, tapi output tidak tercapai |
| *Negosiasi Politik* | Pertukaran program/kegiatan demi dukungan politik | “Titipan anggaran” dari fraksi dalam pembahasan RAPBD |
| *Keterbatasan Transparansi* | Laporan keuangan sulit diakses atau dipahami publik | Laporan dalam format teknis, tidak ada ringkasan awam |
| *Peran Media dan Aktor Sipil* | Media lokal pasif atau terpolarisasi oleh kepentingan penguasa | Berita hanya mengulang rilis resmi pemerintah |

## Diskusi

**E-ISSN : XXXX-XXXX**
**P-ISSN : XXXX-XXXX**

Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa laporan keuangan daerah, khususnya APBD di Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak hanya berperan sebagai alat teknis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, melainkan juga menjadi instrumen politik yang berfungsi memperkuat kekuasaan, mengakomodasi kepentingan elit lokal, dan membentuk persepsi masyarakat.

Beberapa implikasi penting yang dapat diambil adalah: Politik anggaran tidak bersifat netral, karena proses penentuan dan penyusunan anggaran lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik seperti balas jasa atau konsolidasi kekuasaan dibandingkan oleh kebutuhan publik yang obyektif. Narasi "pro-rakyat" yang disampaikan dalam laporan keuangan cenderung bersifat simbolik dan digunakan untuk menciptakan citra positif pemerintah, bukan benar-benar mencerminkan kondisi fiskal yang sebenarnya. Selain itu, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersifat ambivalen; meskipun secara resmi dianggap sebagai mitra pengawas, dalam prakteknya fungsi pengawasan tersebut sering kali dilunakkan oleh kompromi politik.

Penelitian ini juga mengisi sejumlah kekosongan dalam literatur, seperti: Pertama, kurangnya studi yang menggunakan pendekatan naratif dalam akuntansi publik, khususnya di wilayah 3T seperti NTT, di mana literatur yang ada didominasi oleh pendekatan positivistik dan kuantitatif yang kurang mampu menangkap dinamika kekuasaan, makna simbolik, dan konteks sosial-politik di balik laporan keuangan. Kedua, minimnya fokus terhadap dimensi politik dalam praktik pelaporan keuangan daerah, di mana sebagian besar studi lebih menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran tanpa menyoroti fungsi narasi dan retorika sebagai alat legitimasi politik. Ketiga, masih sedikit penelitian yang mempelajari interaksi antara aktor politik, birokrasi, dan media lokal dalam proses pembuatan serta konsumsi laporan keuangan daerah Berdasarkan temuan dan keterbatasan studi ini, berikut beberapa arah riset selanjutnya:

1) Perluasan konteks geografis ke provinsi lain di Indonesia, terutama dengan karakter politik dan budaya berbeda, untuk memahami apakah praktik serupa juga terjadi.
2) Eksplorasi terhadap peran media lokal dalam membentuk narasi laporan keuangan publik. Media dapat menjadi amplifier maupun filter narasi politis APBD.
3) Penelitian etnografis jangka panjang untuk menggali secara lebih dalam praktik sehari-hari birokrat dan politisi dalam menyusun dan menarasikan laporan keuangan.
4) Analisis wacana kritis terhadap dokumen-dokumen resmi anggaran, termasuk pidato kepala daerah dan laporan pertanggungjawaban keuangan, untuk menyingkap logika kekuasaan yang tersembunyi di balik retorika formal.

## Kesimpulan

Ringkasan utama dari temuan dan rekomendasi penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak hanya berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan transparansi publik, tetapi juga memiliki peran penting sebagai instrumen politik dalam proses pengambilan keputusan, negosiasi kekuasaan, serta pembentukan citra pemerintahan. Melalui pendekatan naratif, studi ini menemukan bahwa penyusunan dan penyajian APBD di beberapa kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur penuh dengan narasi politis. Narasi ini digunakan oleh elit pemerintahan untuk memengaruhi opini publik, memperkuat posisi politik, melakukan negosiasi kepentingan antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta menjalankan agenda tersembunyi yang tidak selalu selaras dengan kepentingan masyarakat. Temuan penting lain adalah praktik "akuntansi simbolik," di mana data keuangan digunakan tidak hanya untuk melaporkan kinerja finansial, melainkan untuk menciptakan narasi kesuksesan atau menutup kritik. Praktik ini mengilustrasikan bagaimana anggaran dapat dimanipulasi secara naratif untuk membenarkan kebijakan tertentu atau mengalihkan perhatian dari masalah mendasar seperti ketimpangan, inefisiensi, dan pengelolaan sumber daya yang kurang adil.

**Rekomendasi Penelitian Selanjutnya**

1. Pendalaman pada Level Mikro: Penelitian mendatang dapat menelusuri bagaimana praktik naratif ini berlangsung dalam penyusunan anggaran di tingkat kecamatan atau desa untuk melihat replikasi pola politik-anggaran pada level yang lebih kecil.
2. Studi Perbandingan Antar Provinsi: Untuk memperkaya pemahaman, perlu dilakukan studi naratif di daerah lain guna membandingkan bagaimana dinamika politik memengaruhi pelaporan keuangan dalam konteks sosial-politik yang berbeda.
3. Pendekatan Partisipatif: Disarankan menggunakan metode partisipatif yang melibatkan warga, jurnalis lokal, dan kelompok masyarakat sipil untuk menggali bagaimana narasi anggaran dipahami dan dilawan oleh publik.
4. Analisis Media dan Wacana: Penelitian lanjutan bisa fokus pada analisis wacana media terhadap APBD dan bagaimana pemberitaan turut membentuk narasi dominan yang pro atau kontra terhadap pemerintah.

**E-ISSN : XXXX-XXXX**
**P-ISSN : XXXX-XXXX**

**Daftar Pustaka**

Ade Irawan & Apung Widadi (ICW). (2008) Membedah Anggaran Publik

Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Science Research. SAGE Publications.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." American Sociological Review, 48(2), 147–160.

Harun, H., & Kamase, H. (2012). Political budget cycles in Indonesia: Evidence from local government. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 16(1), 23–34.

Harun, H., An, Y., & van Peursem, K. (2012). "Public sector accounting reforms in an emerging economy: A critical institutionalism perspective." Critical Perspectives on Accounting, 23(6), 451–471.

Hopper, T., & Powell, A. (1985). "Making sense of research into the organizational and social aspects of management accounting: A review of its underlying assumptions." Journal of Management Studies, 22(5), 429–465.

Indra Bastian, (2014, Edisi revisi) Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.

Kaho, J. (2014). Politik anggaran dan kesejahteraan di daerah tertinggal: Studi di Kabupaten Kupang. Jurnal Politik Indonesia, 2(2), 55–68.

Laughlin, R. (1995). "Methodological themes: Empirical research in accounting: Alternative approaches and a case for 'middle-range' thinking." Accounting, Auditing & Accountability Journal, 8(1), 63–87.

Mardiasmo, D., & Djamhuri, A. (2006). Akuntansi sektor publik dan simbol kekuasaan: Studi interpretatif terhadap wacana akuntabilitas publik. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 10(1), 1–17.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

M. Ryaas Rasyid. (2003) Politik Anggaran di Indonesia: Antara Kepentingan Publik dan Kepentingan Elite.

Nababan, M. R., & Eko, S. (2018). Politik anggaran daerah: Studi kasus NTT menjelang Pilkada. Jurnal Otonomi Daerah, 15(2), 45–60

Oakes, L. S., Townley, B., & Cooper, D. J. (1998). "Business planning as pedagogy: Language and control in a changing institutional field." Administrative Science Quarterly, 43(2), 257–292.

Prabowo, H., & Sutopo, B. (2018). "Akuntansi dan Politik Anggaran: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah." Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 15(1), 85–100.

Suchman, M. C. (1995). "Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches." Academy of Management Review, 20(3), 571–610.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015) Akuntansi dalam Perspektif Kritis

Tinker, T. (1980). "Towards a political economy of accounting: An empirical illustration of the Cambridge controversies." Accounting, Organizations and Society, 5(1), 147–160.

Yani, A. (2020). Anggaran dan narasi kekuasaan: Studi naratif atas APBD di Kabupaten X. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 24(1), 87–101.